



Jurnal HISTORICA

E-ISSN: 2964-9269

ISSN: 2252-4673



Publisher:
History Education Study Program
University of Jember



Vol. 7 No. 2, 2023

Jurnal HISTORICA

E-ISSN: 2964-9269

ISSN: 2252-4673

- | | |
|--|-----|
| <i>Captain Wardiman's Way of Fighting the Dutch</i>
<i>Petrik Matanasi</i> | 157 |
| <i>The Israel-Palestine Sovereignty Struggle:
A Historical Review Based On Territorial Claims</i>
<i>Affilah Putra Pratama, et al.</i> | 191 |
| <i>History of Gemeente Probolinggo 1918-1942</i>
<i>Afif Maulana, et al.</i> | 208 |
| <i>Soekertijo: The Lunge of Officers from Lumajang
1946-1988</i>
<i>Dwi Ayu Anggraeni, et al.</i> | 226 |
| <i>Utilization Of the Sarekat Islam Building in
Semarang As A Living History Learning Model
for History Subjects During The Indonesian
Movement As A Living History Learning Model
for History Subjects During The Indonesian
Movement</i>
<i>Siti Khusnul Khotimah, et al.</i> | 260 |
| <i>The Implementation of Merdeka Curriculum on
Historical Subject at SMA Negeri 3 Jember</i>
<i>Laily Setyawati, et al.</i> | 271 |
| <i>Implementation of Women's Movement Values in
Java as History Learning Resources</i>
<i>Aqilla Az-Zahra</i> | 291 |
| <i>Soviet Union Spionage Arrest In Indonesia 1982</i>
<i>Syifa Surya Ukasyah, et al.</i> | 307 |
| <i>Application of the Learning Contract Learning
Method to History Learning Activities of Class
X Students in Online Business and Marketing
at State Vocational High School 1 Pontianak</i>
<i>Lidia, et al.</i> | 321 |
| <i>Megalithic Culture In Suboh Sub District Situbondo
Regency</i>
<i>Nurcholis Fitrio Handoko, et al.</i> | 340 |



History of Gemeente Probolinggo 1918-1942

Afif Maulana¹, Sri Ana Handayani², IG Krisnadi³

¹²³Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Jember

E-mail: afifmaulana101@gmail.com

Abstract

This thesis discusses the history of gemeente Probolinggo in 1918-1942. The problems in this thesis are (1) the reasons why the Dutch East Indies government made Probolinggo a gemeente (2) how was the process of forming gemeente Probolinggo (3) What was the impact of the determination of gemeente on the socio-economic status of Probolinggo. The theory used is public policy theory with a social sociology approach and the method used is the historical method. The factors that made Probolinggo a gemeente by the Dutch East Indies were the strategic location of Probolinggo surrounded by sugar factories, tobacco plantations, coffee and ports. Probolinggo got gemeente status on July 1, 1918 (based on Staatsblad van Nederland Indies 322-1918). The impact of the determination of the Probolinggo gemeente is the development of infrastructure facilities that occur in Probolinggo. the development of infrastructure facilities, among others, such as the development of car and bus transportation. In terms of education also experienced developments, namely initially in Probolinggo there were only two schools then in 1929-1930 in Probolinggo there were 7 schools. From the socio-economic point of view, the majority of the population of Probolinggo are Javanese and Madurese, while the Madurese migrated to Probolinggo due to the opening of plantations by the Dutch East Indies government.

Keywords: Gemeente, Development, Infrastructure, Economy, Probolinggo

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan suatu kebijakan menyerahkan atau pengalihan tanggung jawab kewenangan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah undang-undang *Staatsblad* 1903 No 329. Undang-undang ini menambah dasar peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda. Pasal-pasal 123, 124, 125 *Indische Staatregeling* yang kemudian menjadi dasar dari pemberian suatu hak otonomi kepada setiap daerah untuk menyusun anggaran dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan dari daerah tersebut. Selain untuk menyusun anggaran, undang-undang tersebut juga menjadi landasan hukum untuk membentuk dewan-dewan di suatu daerah tersebut. Berdasarkan undang-undang dan aturan tersebut maka kota-kota yang telah memenuhi syarat diubah statusnya menjadi kota otonom yang memiliki pemerintahan sendiri. Kota-kota tersebut kemudian dijadikan sebagai *gemeente* (Basundoro, 2012)

Belanda mengeluarkan kebijakan desentralisasi karena ada pemikiran-pemikiran etis (politik balas budi) yang muncul pada tahun 1893 yang mengharuskan mendorong pemerintah Belanda agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap Indonesia karena telah menjajahnya. Pada tahun 1893 tokoh politik dari Belanda yaitu Van Kol melakukan kritik karena kehidupan masyarakat Indonesia yang mengalami kemerosotan ketika dijajah oleh Belanda, sedangkan kritik dari Van Deventer tertuang lewat tulisan yang berjudul “Hutang Kehormatan” pada tahun 1899. Van Deventer mengemukakan tentang keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah Belanda selama menjajah Indonesia. Van Deventer juga mempunyai pendapat bahwa Belanda telah melakukan suatu eksploitasi hasil bumi di Indonesia dan uang dari hasil eksploitasi tersebut harus dikembalikan kepada rakyat Indonesia karena itu merupakan hutang yang harus dibayar. Akibat dari adanya kritik-kritik tersebut, akhirnya pada tahun 1901 mendorong Ratu Belanda untuk melakukan pidato tentang *spirit* etis. Maksud dari pidato tersebut yaitu Belanda akan melakukan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap rakyat Indonesia. Dengan

adanya pidato tersebut, berarti politik etis sudah dimulai. Dengan demikian, Belanda agar melakukan perubahan bagi tanah jajahannya yaitu harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia (Ricklefs, 2002).

Secara umum, pemerintahan Belanda melakukan kebijakan desentralisasi ini pada pada tahun 1903. Tujuan dari desentralisasi ini untuk mengatur keuangan dan pajak. Dilakukannya Kebijakan ini dilakukan karena keterkaitannya dengan sistem liberal yang terjadi di Indonesia. Sistem liberal ini disebabkan karena urusan-urusan dari pemerintahan yang berada di daerah-daerah pada abad 19 semakin kompleks dan tidak bisa ditangani lagi oleh pemerintahan Hindia Belanda yang berada di Batavia. Kepentingan dari Belanda yang begitu meningkat di daerah-daerah seperti pabrik-pabrik mulai tumbuh dan banyak sekali perkembangan, maka dibutuhkan fasilitas-fasilitas di daerah seperti kereta api dan Pelabuhan (Yoki, 2010).

Pemerintah Belanda menetapkan *gemeente* Probolinggo pada tanggal 1 Juli 1918. Penetapan *gemeente* oleh pemerintah Belanda tersebut berdasarkan lembaran negara (*Staatsblad* 322-1918). Pemberian status *gemeente* tersebut karena Probolinggo dianggap memiliki kawasan yang strategis pada waktu itu. Probolinggo yang dilalui oleh jalan raya pos yang menghubungkan dengan kota-kota di pantai utara Jawa mulai dari Anyer sampai Panarukan, oleh karena itu Probolinggo merupakan wilayah titik temu yang penting. Probolinggo juga dikelilingi oleh pabrik gula, perkebunan tembakau, perkebunan kopi, dan terdapat Pelabuhan yang menampung dan mengirim hasil-hasil dari perusahaan tersebut (Nasution, 2006).

Tulisan ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui latar belakang Belanda menjadikan Probolinggo sebagai *gemeente* (2) Untuk mengetahui perkembangan *gemeente* Probolinggo, dan (3) Mengetahui dampak yang diperoleh atau yang dirasakan oleh masyarakat Probolinggo sejak probolinggo ditetapkan *gemeente* oleh pemerintah Belanda. Adapun manfaat tulisan ini yaitu (1) Untuk pengembangan ilmu sejarah itu sendiri yaitu dapat memperkaya jenis-jenis penulisan sejarah, tidak hanya sejarah tentang politik, ekonomi namun juga ada sejarah tentang perkotaan (2) Untuk mengetahui perkembangan *gemeente* Probolinggo (3) Mengetahui dampak

yang diperoleh atau yang dirasakan oleh masyarakat Probolinggo sejak probolinggo ditetapkan *gemeente* oleh pemerintah Belanda.

Ruang lingkup tulisan ini terdiri dari ruang lingkup spasial, temporal, dan kajian (perspektif). Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah wilayah Kota Probolinggo. Ruang lingkup temporal pada penelitian ini yaitu pada tahun 1918 sampai dengan tahun 1942. Tahun 1918 merupakan awal pemerintahan Belanda menetapkan Probolinggo sebagai *gemeente* berdasarkan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Belanda (*Staatsblad* 322-1918). Tahun 1942 merupakan berakhirnya pemerintahan *gemeente* diseluruh Indonesia, karena pada waktu itu Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda. Dengan demikian, semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhenti.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian sangat diperlukan suatu metode sejarah dalam penulisannya. Maksud dari metode sejarah yaitu proses yang menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau. Dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi para peneliti berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), kritik, intepretasi dan historiografi (Gottschalk, 1987).

Tahapan pertama yaitu heuristik (pengumpulan sumber) merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang didapat melalui sumber primer ataupun sekunder.

Tahapan yang kedua adalah kritik sumber, dalam kajian ini, tujuan dari kritik sumber yaitu untuk memperoleh otentitas (keaslian) dan kredibilitas (tingkat kebenaran) sumber. Alasan dilakukannya kritik sumber ini, karena tidak semua sumber yang diperoleh dapat digunakan sebagai sumber dari sejarah. Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern lebih memfokus pada aspek luar dari sumber-sumber yang didapatkan. Kritik

intern lebih mengarah pada aspek yang ada di dalam sumber yang didapat agar dapat dipercaya sebagai fakta sejarah.

Tahapan yang ketiga adalah interpretasi, tahapan ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menulis sejarah. Pada tahapan ini penulis melakukan penafsiran dari sumber yang sudah terkumpul sebelumnya. Interpretasi dibagi menjadi dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Pada tahapan ini penulis melakukan analisis terhadap sumber-sumber yang lolos pada tahap kedua dengan cara melakukan mencari hubungan antar semua fakta-fakta yang telah dicari dan ditemukan yang berdasarkan hubungan dengan kronologis, sebab akibat dan pokok permasalahan.

Tahapan terakhir yang dilakukan untuk penelitian yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Tahapan ini yaitu melakukan sebuah rekonstruksi peristiwa masa lampau atau masa lalu dalam bentuk tulisan sebuah cerita sejarah yang dituangkan secara tertulis. Historiografi dalam penulisan sejarah merupakan puncak dari kegiatan sebuah penelitian sehingga dapat dikatakan bahwa langkah dari historiografi merupakan yang terberat dari semua langkah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kota Probolinggo Sebelum Tahun 1918

pada saat zaman Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Radjasanagara atau sering terkenal dengan sebutan Hayam Wuruk, Probolinggo lebih dikenal dengan sebutan Banger. Banger merupakan nama sebuah sungai yang mengalir Probolinggo. Pada tahun 1359 M Raja Hayam Wuruk pernah melakukan perjalanan ke Banger dalam upaya agar bisa mendekati diri dengan rakyatnya, Prabu Hayam wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah seperti Lumajang, Probolinggo dan Bondowoso. Perjalanan itu dilakukan agar sang Prabu dapat melihat bagaimana kehidupan masyarakat di desa-desa daerah tersebut. dalam perjalanan tersebut Prabu Hayam Wuruk singgah di desa Banger, Baremi dan

Borang. Desa tersebut saat ini menjadi wilayah bagian administrasi Kota Probolinggo (Sapto, 2012).

Pada tanggal 4 September tahun 1359 Masehi Prabu Hayam Wuruk tersebut singgah di desa Banger, Baremi dan Borang. Masyarakat desa tersebut menyambut dengan baik. Saat itu Prabu Hayam Wuruk perintahkan kepada masyarakat Banger agar mempeluas wilayah Banger dengan membuka hutan yang ada di sekitarnya. Kemudian setelah wilayah itu diperluas akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Sejalan perkembangannya, wilayah Banger mengalami perubahan-perubahan seiring dengan peluasan wilayah yang dilakukan oleh Hayam Wuruk. Banger awalnya pedukuhan kecil di muara kali, kemudian berkembang menjadi sebuah Pakuwon yang dipimpin oleh Akuwu dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit (Graaf, 1986).

Pada abad ke 14 sampai abad ke16 Probolinggo dikuasai oleh Kerajaan Mataram setelah Sultan Agung melancarkan ekspansi terhadap wilayah Blambangan pada tahun 1635. Sultan Agung dari Mataram melalui serangan militer dan tahun 1639 berhasil menaklukan seluruh ujung timur Jawa Timur, termasuk Probolinggo. Pada masa Kerajaan Mataram struktur pemerintahan pada dasarnya tidak berbeda dengan masa Kerajaan Majapahit. Struktur pemerintahan tersebut yaitu Raja sebagai penguasa tertinggi berada di pusat Kerajaan, kemudian di bawahnya terdapat bupati wedana yang merupakan pengawas dan koordinator para bupati, bupati atau adipati penguasa kabupaten, demang pemimpin kademangan, petinggi sebagai kepala desa dan pedukuhan yang dipimpin kepala dukuh.

Pada masa Pemerintahan VOC tahun 1743, setelah kompeni dapat meredakan Mataram, dalam perjanjian yang dipaksakan oleh Jenderal Van Imhoff kepada Sunan Pakubuwono II, seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk Banger) diserahkan kepada VOC atau menjadi wilayah kekuasaan VOC pada tahun 1743. Perjanjian tersebut terlaksana akibat dari pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok warga Cina yang melibatkan Mataram Islam pada tahun 1740-1743. Dalam pemberontakan tersebut dipimpin oleh Patih Natakusuma yang

bekerja sama dengan etnis Cina (Sartono, 1987). Kelompok yang anti Belanda menggunakan kesempatan ini dengan cara memerangi VOC dan ingin membebaskan diri dari pengaruh Belanda (Muhiddin, 2021).

Setelah VOC berhasil menguasai wilayah Probolinggo, wilayah tersebut menjadi daerah yurisdiksi kompeni atau VOC, bupati-bupatinya menjadi bagian dari bupati VOC. Pada tahun 1746 VOC mengangkat Kyai Djojolalono sebagai Bupati Pertama di Banger dengan gelar Tumenggung. Pengangkatan tersebut dilakukan karena terdapat satu tokoh lokal yang tidak menerima kejadian tersebut, yakni penguasa Tengger Panembahan Semeru. VOC mempunyai niatan agar Kyai Djojolalono bisa meredam pemberontakan yang dilakukan rakyat kepada VOC dan berhasil membunuh Panembahan Semeru. Setelah menyadari atas kelakuan yang dilakukan yaitu terpengaruh oleh politik adu domba VOC, akhirnya Kyai Djojolalono menyesali tindakannya dan ikut menentang atau melawan kepada VOC. Sebagai sikap permusuhan tersebut, akhirnya Kyai Djojolalono dipaksa mundur dari Bupati Banger pada tahun 1768.

Pada tahun 1768 terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah Banger. Untuk mengisi kekosongan tersebut, akhirnya VOC mengangkat Raden Tumenggung Djojonagoro. Pada masa pemerintahannya, perubahan nama Banger terjadi pada tahun 1770. Nama Banger berubah menjadi Proolinggo. *Probo* mempunyai arti yaitu sinar, sedangkan *Linggo* memiliki arti badan, tugu atau tanda peringatan.

Setelah VOC runtuh, pemerintah Kerajaan Belanda mengambil alih seluruh wilayah kekuasaannya, terutama pulau Jawa. Pada tahun 1808 seorang Marsekal kepercayaan dari Raja Belanda yaitu Loderwijk (Louis) Napoleon imengirim Marsekal Wilhem Herman Daendels ke Batavia untuk menjadi Gubernur Jenderal. Pada masa pemerintahannya, Daendels mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah oleh bangsa lain di Hindia Belanda. Politik yang dijalankan berkaitan dengan penjualan tanah kepada pemilik modal besar terutama kepada orang Cina, Arab dan orang Belanda sendiri.

Daendels menjual Probolinggo kepada Mayor Cina yang bernama Han Kit Ko sebesar 600.000 *spaanschen matten* kemudian diganti dengan uang perak sebesar 2.5 juta Gulden. Pembayaran diangsur 20 kali setiap pembayaran sebesar 125.000 Gulden. Akibat pembelian tanah Probolinggo tersebut, pada tahun 1811 Han Kit Ko secara resmi memiliki Probolinggo yang ditandai dengan upacara. Han Kit Ko memperoleh gelar Mayor Cina dan tuan tanah Probolinggo. penduduk Probolinggo menyebut Han Kit Ko dengan sebutan Tumenggung atau Cina Tumenggung (Winarni, 2011).

Tekanan yang dilakukan oleh Han Ti ko berakibat pada meletusnya pemberontakan yang dikenal dengan geger Winosari yang dipimpin oleh Ki Demang Wirosari pada 13 mei 1813. Tujuan utama mereka adalah untuk menyingkirkan tuan tanah Cina. Peristiwa pemberontakan ini berakibat terbunuhnya Bupati Han Ti Ko beserta pasukan Inggris yang menjadi pengawalnya, (Lekkerkerker, 1931).

Setelah pemberontakan itu terjadi, selama lima tahun Probolinggo tidak ada penguasa dari bumiputera. Baru pada tahun 1818 diangkat penguasa atau pemimpin baru (bupati) Probolinggo yaitu Raden Tumenggung Aryo Notoadiningrat. Dia memimpin Probolinggo selama 3 tahun. Pada tahun 1821 bupati Aryo Notoadiningrat dipindah ke Lasem. Pada tahun 1823 Raden Tumenggung Panji Notonegoro diangkat sebagai bupati untuk menggantikan Aryo Notoadiningrat, (Lekkerkerker, 1931).

Kondisi Geografis

Kota Probolinggo merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis letak dari Kota Probolinggo berada daratan rendah di tepi selat Madura dengan koordinat 7°43'41" sampai 7°49'04" lintang selatan dan 113°10' sampai 113° 15' bujur timur. Wilayah kota Probolinggo memiliki batas wilayah yang terdiri atas: sebelah utara adalah selat Madura, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan

Bantaran dan Kecamatan Sumberasih, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo (BPS, 2012).

Wilayah Kota Probolinggo yang berada di pesisir Pulau Jawa serta memiliki iklim yang panas membuat Kota Probolinggo memiliki intensitas hujan yang rendah serta mempunyai tanah yang subur. Tanah yang subur menjadi keberkahan sendiri bagi masyarakat Probolinggo. Kota Probolinggo sangat cocok sekali jika ditanami buah buahan seperti manga dan anggur, hampir setiap rumah penduduk mempunyai pohon manga serta di beberapa kecamatan terdapat perkebunan. Namun seiring waktu berjalan sering terjadi alih fungsi lahan perkebunan menjadi perumahan, sehingga perkebunan semakin berkurang namun mangga tetap menjadi sebuah komoditas utama bagi penduduk Kota Probolinggo.

Kondisi Demografi

Demografi mempunyai arti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk di suatu negara. Demografi mempelajari tentang struktur dan proses penduduk di suatu wilayah atau daerah. Struktur dari penduduk meliputi tentang jumlah, penyebaran dan komposisi dari penduduk itu sendiri. Struktur dari penduduk selalu berubah-ubah, perubahan tersebut disebabkan oleh proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi dari penduduk. Struktur kependudukan merupakan sebuah aspek yang statis yaitu gambaran penduduk dari hasil sensus penduduk (Ida, 1985).

Tabel 1. Data Penduduk Kota Probolinggo

Tahun	Etnis				Jumlah
	Eropa	Cina	Arab	Pribumi	
1896	512	2.234	287	7.120	10.153
1905	588	2.592	351	11.028	14.559
1920	784	2.919	304	222.307	226.314
1930	1.109	4.099	518	262.115	267.841

Sumber: *Regeerings Almanak voor Netherland-Indies Grondgebied, Bevolking En Inrichting Van Het Bestuur Van Nederlandch Indie 1918 dan Departemen Van ekonomi Sche Zaken, 1934*

Latar Belakang Penetapan Gemeente Probolinggo

Persoalan pergantian bentuk pemerintahan di wilayah Hindia Belanda sudah disuarakan di parlemen Belanda. Pada tahun 1880, terjadi sebuah perdebatan mengenai perlunya dilakukan perubahan pada daerah-daerah jajahan Belanda, perubahan tersebut berhubungan dengan struktur ketatanegaraan di Hindia Belanda supaya tidak bergantung lagi pada Gubernur Jenderal. Usulan mengenai kebijakan desentralisasi di daerah-daerah jajahan juga disuarakan oleh anggota parlemen lain seperti W.K Baron Van Dadem pada tahun 1881, sedangkan J.Th Cramer dan S. Van Houten menyuarkan kebijakan desentralisasi pada tahun 1887, (Wignjosoebroto, 2014).

Perubahan dari sistem pemerintahan di daerah Hindia Belanda untuk menjadi daerah otonomi berasal dari pemerintah Hindia Belanda. Permintaan perubahan sistem pemerintahan dikarenakan semakin banyaknya urusan yang bersifat lokal dan sederhana yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, sangat diperlukan perubahan pada struktur pemerintahan Hindia

Pada pertengahan abad 19 terjadi perkembangan baru dalam pelaksanaan politik kolonial di Hindia Belanda yaitu muncul sebuah gerakan humanis yang dipelopori oleh Van Deventer. Gerakan tersebut menuntut perubahan bentuk hubungan antara Belanda dan Hindia Belanda, (Sudirman, 2014: 273). Van Deventer melakukan kritik terhadap pemerintahan Belanda yang tertuang dalam sebuah tulisan yang berjudul “*Een Eereschuld*” yang berarti hutang kehormatan pada tahun 1899 dan dimuat dalam majalah *De Gids* pada tahun 1901. Van Deventer mengemukakan bahwa politik keuangan dari Belanda tidak dipisahkan antara uang negara induk dan negara jajahan (Ricklefs, 2002).

Van Deventer mengeluarkan sebuah gagasan tentang proses untuk memajukan negara jajahan Belanda, gagasan tersebut ada tiga poin yaitu irigasi, imigrasi dan edukasi. Tiga poin gagasan tersebut disebut dengan Trias Politika. Gagasan politik etis yang dikemukakan oleh Van Deventer membuat pemerintah Belanda menanggapi gagasan tersebut. Menanggapi segala hal yang mendesak

diadakannya desentralisasi di Hindia Belanda kemudian dibuatlah rancangan undang-undang desentralisasi (Hestiliani, 2011)

Dalam rangka melaksanakan *Decentralisatie wet 1903* pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang *Decentralisatie Besluit 1905* (*Staatsblad* 1905 No. 137) dan *local Raden Ordonnatie* (*Staatsblad* 1905 No. 181). Dalam peraturan tersebut daerah yang diberi keuangan sendiri disebut *Locaal Ressort* dan dewannya disebut *Locale Raad* yang dibedakan dalam *Gewestelijke Raad* (dewan keresidenan).

Pemerintah Kolonial Belanda membentuk daerah-daerah desentralisasi yaitu *gemeente* (semacam kota) di seluruh wilayah Hindia Belanda, sebagai daerah yang menyelenggarakan pemerintah lokal yang dipimpin oleh seorang *Burgemeester* atau walikota. Pemberian *gemeente* kepada beberapa daerah di Hindia Belanda ini tidak lepas dari kebijakan politik etis pemerintah Belanda (Wignjosoebroto, 2004).

Probolinggo mendapat status *gemeente* pada tanggal 1 juli 1918 (berdasarkan *Staatsblad* 322-1918) karena ditinjau dari letaknya yang begitu strategis yaitu dikelilingi oleh pabrik-pabrik gula, perkebunan tembakau, kopi dan pelabuhan yang sehingga menampung dan mengirim hasil-hasil dari perusahaan tersebut. Sejak saat itu kota Probolinggo resmi memiliki otonomi yang terbatas, artinya kekuasaan pemerintah daerah belum sepenuhnya berkuasa. *Gemeente* belum bisa membuat suatu perangkat hukum untuk mengatur kota. *Gemeente* mempunyai hak untuk mengumpulkan pajak dari penduduk kota yang mana hasilnya akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana kota. Pemerintah *gemeente* juga memiliki sebuah kewajiban untuk mengelola kota.

Proses Menjadi *Gemeente* Probolinggo

Daerah-daerah Hindia Belanda yang dijadikan *gemeente* oleh Pemerintah Belanda tidak satu pun yang mengalami perubahan secara langsung, semua pasti mengalami sebuah proses apalagi kota kecil seperti Probolinggo. Probolinggo yang awalnya hanya sebuah kota kecil yang berada di Jawa Timur harus melewati

beberapa tahun agar bisa menjadi *gemeente*. Setelah syarat-syarat *gemeente* dimiliki oleh Probolinggo seperti keuangan, penduduk yang bertempat dan keadaan wilayah setempat (Supangkat, 2007).

Dalam *Staatsblad van Nederland-Indie* no 322 tahun 1918 mengenai kebijakan dari pemerintah Belanda bahwa ditetapkan untuk bagian dari wilayah Pasuruan supaya membentuk ibukota Probolinggo. Wilayah ini disebut kota Probolinggo. Untuk itu kota Probolinggo dipisahkan dari dari kas kolonial sejumlah 28.123 gulden, kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 1 juli 1918, (*Staatsblad* No 322 Pasal 6 Tahun 1918).

Perkembangan Sarana Prasarana *Gemeente* Probolinggo

Bentuk dan struktur kota Probolinggo sejak jaman dulu sudah dianggap istimewa, karena jalan yang ada di daerah Probolinggo lebar-lebar dan saling memotong secara tegak lurus. Sampai akhir kekuasaan Belanda tahun 1942, Probolinggo mengalami perluasan dalam dua tahapan. Tahap yang pertama yaitu perluasan bagian kota sebelah timur dan barat dari *Heernstaat* (sekarang menjadi Jl. Suroyo) yang merupakan sumbu utama kota. Perluasan tersebut dilakukan karena pada tahun 1850 Probolinggo menjadi keresidenan (Handinoto, 1997).

A. Pasar

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, pasar tradisional di Probolinggo mengalami perbaikan dengan tujuan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli. Keberadaan pasar tradisional mempunyai peran begitu penting sebagai penghasil bagi penduduk kota Probolinggo. Masyarakat Probolinggo pada zaman Hindia Belanda paling dominan berprofesi sebagai pekebun dan petani. Hal tersebut yang menjadikan pasar tradisional mempunyai peran yang besar bagi masyarakat Probolinggo. Bahkan ketika Probolinggo dijadikan *gemeente*, pemerintah Hindia Belanda mempunyai kebebasan dalam mengatur keuangan, sehingga adanya potensi tersebut sarana dan prasarana di Probolinggo ditingkatkan.

B. Perkembangan Transportasi

Munculnya sebuah potensi yang mengenai kebutuhan transportasi untuk masyarakat Probolinggo, membuat salah satu pengusaha pribumi asal Probolinggo mengembangkan usaha transportasi. Pada tahun 1933 Perusahaan transportasi di Probolinggo tersebut dikembangkan oleh Ali Karman. Usaha awalnya yang dilakukan oleh Ali Karman yaitu sebagai bengkel untuk melayani perbaikan mesin motor. Setelah mempunyai modal, akhirnya Ali Karman membeli mobil bekas sebagai awal untuk membuka layanan mobil pengangkut barang dan manusia. Keberadaan mobil tersebut sangat membantu penduduk karena dengan adanya kendaraan tersebut perjalanan mereka lebih cepat. Kemudian Ali Karman membeli truk. truk ini tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi, tetapi juga untuk disewakan. Truk tersebut beroperasi untuk mengangkut hasil bumi, hasil perkebunan dan kebutuhan pokok sehari-hari (Firmandani, 2021).

Pada tahun 1936 usaha pelayanan angkutan dikembangkan lagi dengan membeli sebuah bus kecil. Bus ini kemudian menjadi awal rute perjalanan antara Probolinggo ke Brebi. Pemilihan rute tersebut karena daerah tersebut belum didukung sarana transportasi kereta dan juga intensitas pengangkutan hasil dari perkebunan dari Brebi ke Probolinggo terbilang cukup tinggi. Pada pengoperasian pertama kali, bus ini hanya mampu mengangkut 16-18 orang. Meskipun demikian, mayoritas penumpang dari bus masih didominasi oleh penduduk Eropa dan sedikit dari penduduk pribumi yang menggunakan transportasi bus (Firmandani, 2021).

Perkembangan Pendidikan Probolinggo

Probolinggo merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Timur yang mendapatkan perhatian dari pemerintah Hindia-Belanda dengan dibangunnya fasilitas pendidikan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Probolinggo pada waktu itu. Alasan utama dibangunnya fasilitas pendidikan yaitu untuk memenuhi kepentingan administrasi pemerintahan *gemeente* Probolinggo.

Pada abad 19 pendidikan yang disediakan di gemeente Probolinggo hanya sekolah raja (*Hoofdenschool*) dan juga sekolah guru (*Kweekschool*), hal tersebut tidak membuat gemeente Probolinggo mendirikan setiap jenis sekolah untuk memenuhi pendidikan bagi penduduk Probolinggo. Selama menjadi status gemeente, Probolinggo tercatat hanya menyediakan fasilitas sekolah tingkat dasar dan lanjut. Pada tahun 1929-1930 di Probolinggo terdapat 7 sekolah yaitu *Europeesche Lagere School* (ELS), *Hollandsche Inlandsche School* (HIS), *Hollandsche Chineesesche School* (HCS), *Schakelschool* (sekolah rakyat), *Volkschool* (sekolah desa), *Vervogschool* (sekolah lanjutan), dan *Voll. 2e kl. School* (sekolah ontko loro) (Mayshurah: 2021).

Tabel 2. Data Murid Sekolah Dasar Berdasarkan Jenis Sekolah

Jenis Sekolah	Jumlah Murid Laki-laki	Jumlah Murid Perempuan
Volkschool	7050	546
Vervolgschool	285	57
Voll. 2e kl. School	4067	317
ELS	262	238
HCS	161	83
HIS	488	240
Schakelschool	69	1
Total	12.382	1.482
Total semua	13.864	

Sumber: *Algemeene Verslag van het Onderwijs in Nederlands Indie Over het Schooljaar 1929/ 1930*

Perubahan Sosial Ekonomi

Probolinggo menjadi kota yang dibentuk oleh Hindia-Belanda yang memiliki beragam etnis masyarakat dan stratifikasi sosial yang meliputi Eropa, Cina, Timur Asing dan pribumi. diantara etnis tersebut Eropa merupakan etnis kelas tertinggi. Adanya keberagaman tersebut menimbulkan kontak sosial dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat pribumi Probolinggo yang mendominasi tidak hanya dari suku Jawa, tetapi juga dari suku Madura. Secara geo-kultural masyarakat Probolinggo

pada dasarnya merupakan masyarakat yang beragam. Sebagian besar daerah di Probolinggo didominasi oleh suku Jawa dan Madura, dan ada juga suku lainnya seperti etnis Cina dan Arab. Dengan adanya keberagaman penduduk di Probolinggo tersebut menimbulkan kontak sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagai penyandang golongan yang rendah, maka tingkat interaksi antara kaum Jawa dan kaum Madura memiliki peluang yang besar. akibat adanya hubungan yang cukup intern menyebabkan terjadinya perpaduan budaya terutama bahasa yang digunakan (Muhiddin, 2021).

Faktor yang menyebabkan orang-orang Madura melakukan migrasi ke daerah ujung Jawa Timur termasuk Probolinggo karena, kemiskinan yang dialami oleh penduduk Madura. kemiskinan tersebut akibat dari keadaan alam yang tidak baik (Hartono, 2010). Selain karena letak geografis yang strategis serta kondisi tanah yang subur yang menjadi daya tarik bagi penduduk Madura untuk datang. Faktor lain perpindahan penduduk Madura juga disebabkan karena dibukanya perkebunan di Probolinggo.

Perkembangan perekonomian di daerah Probolinggo juga disebabkan oleh semakin banyaknya produksi gula. Banyak dari pihak swasta yang menyewa tanah untuk ditanami tebu. Ketika tebu telah dikatakan siap panen, maka petani mengangkutnya ke pabrik. Tebu yang tiba di pabrik akan diproses oleh kuli pabrik untuk dijadikan gula. Para petani akan diberikan upah ketika tebu tersebut sudah menjadi gula (Muhiddin, 2021).

KESIMPULAN

Probolinggo merupakan salah satu kota yang pemerintahnya berbentuk *gemeente*. Probolinggo mendapat status *gemeente* pada tanggal 1 juli 1918 (berdasarkan *Staatsblad* 322-1918) karena ditinjau dari letaknya yang begitu strategis yaitu dikelilingi oleh pabrik-pabrik gula, perkebunan tembakau, kopi dan pelabuhan yang cukup besar sehingga menampung dan mengirim hasil-hasil dari

perusahaan tersebut. Penetapan sebagai daerah *gemeente* oleh Belanda berdampak besar bagi perkembangan wilayah kota Probolinggo. perkembangan kota yang semakin tertata dengan baik dapat dilihat dari sisi kehidupan, yaitu perekonomian Probolinggo yang mulai membaik, dibangunnya sarana-sarana infrastruktur. Sarana prasarana yang dibangun di Probolinggo dikarenakan kebutuhan yang harus diwujudkan oleh pemerintah Probolinggo. Pada tahun 1933 Perusahaan transportasi tersebut dikembangkan oleh Ali Karman yaitu transportasi mobil. Pada tahun 1936 usaha transportasi dikembangkan lagi dengan membeli sebuah bus kecil. Perkembangan transportasi bus di Probolinggo juga mendapat dukungan dari pemerintah Probolinggo.

Selain transportasi, pemerintah Hindia-Belanda juga membangun fasilitas dibidang pendidikan. Pada tahun 1929-1930 di Probolinggo terdapat 7 sekolah yaitu *Europeesche Lagere School* (ELS), *Hollandsche Inlandsche School* (HIS), *Hollandsche Chineesesche School* (HCS), *Schakelschool* (sekolah rakyat), *Volkschool* (sekolah desa), *Vervogschool* (sekolah lanjutan), dan *Voll. 2e kl. School* (sekolah onkko loro).

Pembangunan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah Probolinggo juga berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat. masyarakat Probolinggo pada dasarnya merupakan masyarakat yang beragam. Sebagian besar wilayah di Probolinggo didominasi oleh suku Jawa dan Madura, dan juga suku lainnya seperti etnis Cina dan Arab.

Perkembangan perekonomian di daerah Probolinggo juga disebabkan oleh semakin banyaknya produksi gula. Banyak dari pihak swasta yang menyewa tanah untuk ditanami tebu. Ketika tebu telah dikatakan siap panen, maka petani mengangkutnya ke pabrik. Tebu yang tiba di pabrik akan diproses oleh kuli pabrik untuk dijadikan gula.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Pertama peneliti mengucapkan terima kasih khusus kepada Ibu Sri Ana Handayani dan Bapak IG Krisnadi yang telah menyempurnakan penelitian dan memberikan bimbingan berharga selama proses pengerjaan beserta memberikan informasi berbagai sumber yang relevan terkait permasalahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Staatblad van Nederlandsch No. 219, tahun 1903

Staatsblad van Nederlandsch No. 322, tahun 1918

Regeerings Almanak voor Netherland-Indies Grondgebied, Eerste Gedeelte: Bevolking En Inrichting Van Het Bestuur Van Nederlandch Indie, 1898

Regeerings Almanak voor Netherland-Indies Grondgebied, Eerste Gedeelte: Bevolking En Inrichting Van Het Bestuur Van Nederlandch Indie, 1918

Buku

Basundoro, P. (2012). Pengantar Sejarah Kota. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

De Graaf, H.J. (1986). Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung. Jakarta: Pustaka Grafitifers.

Gottschalk, L.(1987). Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Handinoto. (2012). Sejarah Kota Probolinggo 1746-1942, Ditinjau dari Sudut Bentuk dan Struktur Kotanya. Probolinggo: Museum Probolinggo, 2012.

Lekkerkerker. (1931). “*Probolinggo: Geschiedenis en Overlevering*”. De Indische Gids.

Liang, G.T. (1993). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Ricklefs, M.C. (2002). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Chicago: Stanford Univ Press.

Wignjosoebroto, S. (2004). *Desentralisasi dalam tata pemerintahan kolonial Hindia-Belanda: kebijakan dan upaya sepanjang babak akhir kekuasaan kolonial di Indonesia 1900-1940*. Jakarta: Bayumedia.

Skripsi Dan Jurnal

Firmandani, Iqbal Hastri. "Perkembangan Transportasi Darat (Bus) di Probolinggo Tahun 1933-1956", dalam *e-Journal Pendidikan Sejarah*. Vol. 11, No. 3, 2021.

Hestiliani, Teti. "Decentralisatie Wet Van Nederland Indies 1903", dalam *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*. Vol. 15, No. 2, 2019.

Mayshurah, Tiyo Eka. "Perkembangan Pendidikan Kolonial di Gemeente Probolinggo Tahun 1918-1942", dalam *e-Journal Pendidikan Sejarah*. Vol. 11, No. 2, 2021.

Priyantoko, Yoki Rendra. *Alun-Alun di Pusat Kota Gemeente di Pesisir Utara Jawa pada Abad XX Masehi*. Skripsi. Program Studi Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2010

Winarni, Retno, dkk, "Cina Di Ujung Timur Jawa: Dari Pemegang Kontrak Sampai Bupati Pada Akhir Abad XVIII Hingga Awal Abad XIX", dalam *Artikel Literasi*, Vol. 1, No. 2, 2011.